

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

I. NILAI INDEKS PERKEMBANGAN HARGA DI KABUPATEN LANGKAT

Kabupaten Langkat merupakan daerah Non - Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara yang penilaiannya berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Indeks Perkembangan Harga (IPH) adalah indikator penting yang mengukur perubahan harga berbagai komoditas dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di Kabupaten Langkat, IPH mencakup harga bahan kebutuhan pokok, barang penting lainnya, dan jasa. Memahami perkembangan IPH membantu mengidentifikasi tren inflasi, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi secara umum. Periode April hingga Juni 2024 menunjukkan dinamika harga yang signifikan yang perlu dipahami oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum untuk merencanakan langkah-langkah strategis ke depan.

1. Perubahan Nilai IPH di Kabupaten Langkat

Adapun nilai IPH di Kabupaten Langkat dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Bulan April sampai dengan Juni (Triwulan II) Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Bulan April 2024

Pada Minggu I hingga Minggu IV April 2024 Kabupaten Langkat mengalami deflasi. Tercatat akhir April Minggu IV nilai IPH di Kabupaten Langkat mengalami deflasi sebesar -1.17%, dengan komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar diantaranya Cabai Merah, Cabai Rawit, dan Beras.

b. Bulan Mei 2024

Pada Minggu I sampai dengan Minggu IV Mei 2024 IPH Kabupaten Langkat terus menunjukan perubahan kenaikan IPH. Namun sedikit mengalami penurunan IPH pada Minggu V yakni berada pada angka 1.74%, yang sebelumnya pada Minggu IV sebesar 1,76%. Dengan komoditas yang memberikan andil perubahan harga yakni cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng.

c. Bulan Juni 2024

Kabupaten Langkat masuk 10 besar nasional Kabupaten/Kota, atau 3 besar berdasarkan wilayah di Pulau Sumatera dengan kenaikan IPH tertinggi pada Minggu III Juni 2024 sebesar 2,34%. Dengan komoditas penyumbang andil terbesar yakni cabai merah, daging sapi dan tahu mentah. Tercatat IPH pada minggu I Juni masih terkendali di angka 0.32% dengan komoditas penyumbang kenaikan IPH yaitu cabai merah, susu bubuk, dan minyak goreng.

Tabel 1. Indeks Perkembangan Harga di Kabupaten Langkat Periode April sampai dengan Juni 2024.

BULAN	MINGGU ke-	IPH (%)	KOMODITAS PENYUMBANG IPH
APRIL	1	-0,76	Cabai Merah, Cabai Rawit, Tempe
	2	Lebaran (tidak tersedia)	
	3	-1,17	Cabai Merah, Cabai Rawit, Beras
	4	-1,17	Cabai Merah, Cabai Rawit, Beras
MEI	1	0,87	Cabai Merah, Bawang Merah, Gula Pasir
	2	1,04	Cabai Merah, Bawang Merah, Gula Pasir
	3	1,41	Cabai Merah, Bawang Merah, Gula Pasir
	4	1,76	Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng
	5	1,74	Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng
JUNI	1	0,32	Cabai Merah, Susu Bubuk, Minyak Goreng
	2	1,93	Cabai Merah, Daging Sapi, Tahu Mentah
	3	2,34	Cabai Merah, Daging Sapi, Tahu Mentah
	4	1,49	Daging Sapi, Tahu Mentah dan Udang Basah

Sumber : Data BPS Kabupaten Langkat

Dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Langkat pada periode Juni tidak luput dari atensi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta Pj. Bupati Langkat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat agar segera melakukan intervensi terhadap kenaikan bahan pokok. TPID Kabupaten Langkat berencana menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna pemanfaatan subsidi bahan pokok bagi masyarakat. Adapun intervensi dini yang telah dilakukan yaitu bekerja sama

dengan Satgas Pangan Polres Langkat dalam melakukan Sidak Pasar dan mengecek stok serta ketersediaan beras di kilang dan gudang beras.

2. Perkembangan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya.

Dari hasil monitoring dan survey beberapa komoditas bahan pokok di Kabupaten Langkat sejak bulan April sampai dengan Juni 2024, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Harga Rata-Rata Bahan Pokok di Kabupaten Langkat

No.	KOMODITI	SATUAN	APRIL (Rp)	MEI (Rp)	JUNI (Rp)
1	Gula Pasir	kg	17,722	17,500	17,083
2	Minyak Goreng	liter	26,300	26,300	26,300
3	Daging Ayam Ras / Broiler	kg	35,378	32,323	29,167
4	Daging Ayam Kampung	kg	57,944	60,000	60,000
5	Telur Ayam Ras / Broiler	kg	30,633	32,300	30,713
6	Cabai Merah	kg	38,278	45,742	47,900
7	Cabai Rawit	kg	40,433	29,290	34,467
8	Bawang Merah	kg	48,967	49,806	41,567
9	Bawang Putih	kg	39,356	37,871	37,533
10	Beras Premium	kg	14,511	14,500	14,500
11	Beras Medium	kg	12,411	13,113	13,417
12	Tepung Terigu	kg	11,333	12,000	11,200
13	Tahu Mentah	kg	10,000	10,000	14,800
14	Udang	kg	80,000	80,000	88,000
15	Pisang	kg	15,000	15,000	15,000
16	Ikan Kembung	kg	38,111	35,000	37,333
17	Susu Bubuk Balita	400 gr	40,700	40,700	40,700
18	Mie Instan	bks	3,167	3,000	3,000
19	Susu Bubuk	400 gr	44,733	40,000	45,267
20	Daging Sapi	kg	133,000	125,000	120,833
21	Tempe	kg	15,000	15,000	15,000
22	Jeruk	kg	25,000	25,000	25,000

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Langkat

Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa selama Triwulan II sebagian besar

harga-harga komoditas bahan pokok stabil dan cenderung menunjukkan penurunan. Adapun Komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi pada bulan April hingga Juni adalah adalah cabai merah, udang basah dan tahu mentah. Untuk komoditas cabai merah terus mengalami kenaikan harga yakni pada bulan April Rp. 38.278/kg naik menjadi Rp. 47.900/kg pada bulan Juni.

Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga yang cukup drastis yakni daging sapi pada bulan April Rp. 133.000/kg turun menjadi Rp. 120,833/kg, dan bawang merah Rp. 48.967/kg turun menjadi Rp. 41.567/kg pada Juni. Untuk harga komoditas yang lain terjadi kenaikan dan juga penurunan tapi tidak begitu signifikan.

3. Resiko ke Depan

- a. Ketersediaan komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging sapi, udang basah dan tahu mentah dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas harga dan menyebabkan kenaikan ataupun perubahan indeks perkembangan harga.
- b. Sentimen pasar dalam menghadapi HBKN Idul Adha 1445 H Tahun 2024 di Triwulan II menyebabkan kenaikan beberapa komoditas khususnya cabai merah, udang basah, dan tahu mentah.
- c. Perlu memperhatikan perkembangan harga komoditas cabai merah, udang basah dan tahu mentah agar ketersediaan dan harga barang dapat terjaga dan stabil.
- d. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dapat berdampak optimal terhadap ekonomi, khususnya pada beberapa sektor strategis seperti konstruksi, transportasi, akomodasi makanan dan minuman, serta perdagangan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN IPH DI KABUPATEN LANGKAT

Permasalahan yang mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga di Kabupaten Langkat sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk diatasi. Keterbatasan infrastruktur distribusi, ketergantungan pada pasokan luar daerah, variabilitas produksi pertanian, kurangnya data dan informasi pasar, kebijakan harga dan tarif yang tidak konsisten, kurangnya pengawasan dan regulasi pasar, pengaruh ekonomi global, kurangnya diversifikasi ekonomi, serta perubahan permintaan konsumen adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan fluktuasi IPH.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Langkat pada Triwulan II Tahun 2024 antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi

Masalah: Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang rusak dan terbatasnya sarana

transportasi, menghambat distribusi barang dan jasa di Kabupaten Langkat.

Dampak: Ketidakstabilan pasokan barang di pasar menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan, khususnya untuk barang-barang kebutuhan pokok.

2. Ketergantungan pada Pasokan dari Luar Daerah

Masalah: Kabupaten Langkat masih sangat bergantung pada pasokan barang dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Dampak: Ketergantungan ini membuat harga di Kabupaten Langkat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan dari daerah pemasok.

3. Variabilitas Produksi Pertanian

Masalah: Produksi pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan faktor musiman.

Dampak: Ketidakstabilan produksi menyebabkan fluktuasi harga komoditas pertanian, yang berdampak langsung pada IPH.

4. Kurangnya Data dan Informasi Pasar yang Akurat

Masalah: Kurangnya sistem pengumpulan data yang efisien dan kurangnya informasi pasar yang akurat.

Dampak: Tanpa data yang tepat, sulit bagi pembuat kebijakan untuk merespons perubahan harga dengan cepat dan efektif.

5. Kurangnya Pengawasan dan Regulasi Pasar

Masalah: Pengawasan dan regulasi pasar yang kurang efektif dalam mengendalikan praktik monopoli dan penimbunan.

Dampak: Penimbunan dan spekulasi harga oleh pedagang besar menyebabkan harga barang meningkat secara tidak wajar.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN DI DAERAH

Adapun kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan strategi 4K yang disepakati yaitu, :

1. KETERJANGKAUAN HARGA :

Dalam memastikan harga komoditas tetap stabil agar terjangkau masyarakat, maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sidak pasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Tim Satgas Pangan Kabupaten Langkat bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru Kecamatan

Stabat pada tanggal 7 dan 17 Mei 2024.

- b. Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring Unsur Forkopimda Kabupaten Langkat untuk mengecek ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan, SPBU Paluh Manis Kecamatan Gebang dan SPBU Paya Bakung Kecamatan Tanjung Pura menjelang Hari Besar Keagamaan (HBKN) Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 pada tanggal 3 April 2024.
- c. Melakukan monitoring perkembangan harga dan ketersediaan Bapokting menjelang Hari Besar Keagamaan (HBKN) Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru pada tanggal 5 April 2024 dan Pasar Tradisional Kuala pada tanggal 20 April 2024.
- d. Melakukan monitoring pendistribusian Gas LPG Tabung 3 Kilogram guna mengecek ketersediaan dan HET di pangkalan wilayah Kecamatan Stabat pada tanggal 22 April 2024.
- e. Tim gabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polres Langkat dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Langkat melakukan monitoring perkembangan harga Bapokting bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru pada tanggal 25 Juni 2024.

2. KETERSEDIAAN PASOKAN :

Sebagai upaya dalam menjaga ketersediaan pasokan komoditas di pasar, maka pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan beberapa langkah terkait, antara lain:

- a. Melakukan monitoring ketersediaan Bapokting sekaligus pembukaan Pos Pantau Inflasi Sejahterakan Masyarakat Terayomi (PUSPITA SAKTI) bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru Kecamatan Stabat pada tanggal 2 April 2024.
- b. Unsur Forkopimda Kabupaten Langkat melakukan rangkaian kegiatan berupa sidak pasar dan pemantauan harga Bapokting bertempat di Pasar Tradisional Stabat. Monitoring ketersediaan stok beras bertempat di Gudang Bulog Stabat dan juga monitoring ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bertempat di SPBU Stabat menjelang Hari Besar Keagamaan (HBKN) Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 pada tanggal 2 April 2024.
- c. Melaksanakan Operasi Pasar Murah di 23 Kecamatan Kabupaten Langkat pada HBKN menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 masing-masing dengan jumlah beras sebanyak 10 ton dengan lokasi terakhir di Kecamatan Secanggang pada tanggal 3 April 2024.
- d. Melaksanakan Sidak Pasar monitoring perkembangan harga dan ketersediaan Bapokting menjelang HBKN Idul Fitri 1445 H bertempat di Pasar Tradisional Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Kuala pada tanggal 3 April serta Pasar Tradisional Kecamatan Stabat pada tanggal 5 April 2024.
- e. Launching program kerja Bupati Berkolaborasi Kejar Pembangunan Daerah Sampai Tuntas (BUBUR PEDAS) melalui Warung Sembako Murah Atasi Inflasi Daerah (WAK RASIDAH) bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru pada tanggal 5 April 2024.
- f. Melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) bertempat di Pasar Tradisional Kecamatan Kuala pada tanggal 20 April dan Pasar Tradisional Kecamatan Stabat pada tanggal 7 Mei 2024.
- g. Pemerintah Kabupaten Langkat sudah melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi terkait Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi untuk sektor pangan dan hortikultura yang tertuang

dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan telah ditandatangani masing-masing Bupati bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 13 Mei 2024.

- h. Kegiatan Pos Pantau Inflasi Sejahteraan Masyarakat Terayomi (PUSPITA SAKTI) dan Sidak Pasar monitoring perkembangan harga dan ketersediaan Bapokting bertempat di Pasar Tradisional Kecamatan Stabat pada tanggal 15 Mei 2024.
- i. Melaksanakan program kerja TPID Kabupaten Langkat salah satunya Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan kegiatan program inovasi Beri Makan Ikan (BERIMAN) bertempat di Kecamatan Brandan pada tanggal 15 Mei 2024.
- j. Melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di 5 Kecamatan Kabupaten Langkat yakni Kecamatan Bahorok, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Sei Bingai dan Batang Serangan pada tanggal 22, 27, 29, 30 Mei dan 04 Juni 2024.
- k. Melaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM) di 3 lokasi yakni Kecamatan Stabat, Tanjung Pura dan Sei Lapan bertempat di halaman Kantor Camat pada tanggal 5 Juni 2024.
- l. Melaksanakan Sidak Pasar monitoring perkembangan harga dan ketersediaan Bapokting bertempat di Pasar Tradisional Kecamatan Stabat pada tanggal 6 Juni 2024.

3. KELANCARAN DISTRIBUSI :

Sebagai upaya untuk mendukung Pengendalian Inflasi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Langkat mengambil kebijakan:

- a. Bantuan transportasi darat (Bus) kepada masyarakat umum secara gratis dengan rute Mesjid Raya Kota Stabat menuju Stasisun Kereta Api Kwala Bingai (PP).
- b. Bantuan transportasi air (Speed Boat) dengan rute Dermaga Tanjung Ibus Secanggang menuju Dermaga Jaring Halus Secanggang yang diperuntukan untuk ASN, Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan secara gratis.
- c. Pemberian bantuan usaha bersama kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) NAPZA, berupa bibit domba lokal jantan sebanyak 4 ekor dan bibit domba lokal betina sebanyak 20 ekor.
- d. Kegiatan pelatihan anyaman lidi sawit untuk 120 orang penyandang disabilitas bertempat di Aula Dinas Sosial Kabupaten Langkat.
- e. Bantuan sosial pemberian sembako dalam mengatasi kesulitan dan masalah sosial bagi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di beberapa kecamatan Kabupaten Langkat dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPC. Langkat.
- f. Bantuan sosial dana transport kepada 30 siswa/i Sekolah Luar Biasa Stabat sebesar Rp. 300.000/bulan untuk 3 bulan mulai April, Mei dan Juni.
- g. Mendorong penjualan komoditas melalui pemanfaatan e-Pasar Kabupaten Langkat.

4. KOMUNIKASI EFEKTIF :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi, maka diperlakukan berbagai upaya komunikasi melalui Rapat-Rapat Teknis, diantaranya :

- a. High Level Meeting terkait Perubahan Indeks Perkembangan Harga di Kabupaten Langkat bertempat di Ruang Langkat Command Center pada tanggal 25 Maret 2024.

Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual (Zoom Meeting) yang dipimpin Bapak Bupati Langkat, Sekretaris Daerah ataupun Asisten Pemerintahan dan Pembangunan bertempat di Ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati pada setiap Senin mulai bulan April, Mei dan Juni 2024 (Triwulan II).

- c. Rapat koordinasi lintas sektoral Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Langkat terkait penyusunan Roadmap TPID Kabupaten Langkat 2024-2025 bertempat di Ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat pada tanggal 1 April 2024.
- d. Melakukan Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil telur, daging ayam broiler, beras dan daging sapi bertempat di Kantor Bupati Serdang Bedagai pada tanggal 16 April 2024.
- e. High Level Meeting Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Langkat bertempat di Rumah Dinas Bupati pada tanggal 18 April 2024.
- f. Melakukan Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi dan penjajakan Kerjasama Antar Daerah dalam Bidang Hortikultura dan Ketahanan Pangan bertempat di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi pada tanggal 18 s.d 20 April 2024.
- g. Rapat pembahasan draft KAD dan PKS antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo terkait pengendalian inflasi daerah bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Langkat tanggal 23 April 2024.
- h. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi bersama Bank Indonesia terkait Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Klaster Petani Champion Kabupaten Langkat bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara - Medan pada tanggal 24 April 2024.
- i. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2024 dan kegiatan High Level Meeting bertempat di Ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati pada tanggal 29 April 2024.
- j. High Level Meeting Perkembangan Langkah Konkrit Kabupaten Langkat terkait pengendalian inflasi daerah bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati pada tanggal 30 April 2024.
- k. Melakukan Rapat Pembahasan Tindaklanjut Draft Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Karo pada tanggal 30 April 2024.
- l. Melakukan Rapat Pembahasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pemerintah Kabupaten Dairi terkait Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Karo pada tanggal 30 April 2024.
- m. High Level Meeting tentang Pengusulan Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Langkat bertempat di Kantor Camat Sei Lapan pada tanggal 2 Mei 2024.
- n. Rapat Zoom Meeting penyambungan pembahasan draft KAD dan PKS Kabupaten Langkat dan Kabupaten Dairi bertempat di Ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat pada tanggal 3 Mei 2024.
- o. High Level Meeting Pencegahan Stunting Dalam Penekanan Inflasi di Kecamatan Kabupaten Langkat bertempat di Kantor Batang Serangan pada tanggal 7 Mei 2024.
- p. High Level Meeting Dialog Kinerja Dalam Rangka Optimalisasi Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemkab Langkat Tahun 2024 bertempat di Ruang Langkat Command Center pada tanggal 13 Mei 2024.
- q. High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Langkat bertempat di Langkat Command Center (LCC) pada tanggal 13 Mei 2024.
- r. High Level Meeting Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Langkat bertempat b.

di Rumah Dinas Bupati Langkat pada tanggal 14 Mei 2024.

- s. High Level Meeting Peningkatan dan Pengembangan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Langkat bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati pada tanggal 17 Mei 2024.
- t. High Level Meeting Perkembangan Pupuk Bersubsidi dan Perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Langkat bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati pada tanggal 21 Mei 2024.
- u. High Level Meeting Pembahasan Rencana Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Langkat bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati pada tanggal 22 Mei 2024.
- v. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi daerah bertempat di Kantor Kemendagri - Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024.
- w. Focus Group Discussion bersama Badan Pangan Nasional terkait stabilisasi harga komoditas pangan bertempat di Ruang Rapat Direktorat Ketersediaan Pangan Nasional (BAPANAS) Jakarta pada tanggal 29 Mei 2024.
- x. High Level Meeting Dialog Kinerja Dalam Rangka Optimalisasi Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemkab Langkat Tahun 2024 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat pada tanggal 3 Juni 2024.
- y. Rapat Internal Tim Percepatan Inflasi Daerah Kabupaten Langkat untuk Bulan Juni bertempat di Ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati pada tanggal 3 Juni 2024.
- z. Rapat koordinasi tindaklanjut inflasi daerah terkait langkah intervensi dalam upaya stabilitasi harga Bapokting dengan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat pada tanggal 3 Juni 2024.
- aa. High Level Meeting Dialog Kinerja Dalam Rangka Optimalisasi Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemkab Langkat Tahun 2024 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat pada tanggal 10 Juni 2024.
- ab. Focus Group Discussion Kelompok Tani dan Ternak di Kabupaten Langkat bertempat di Ruang Press Conference Kantor Bupati Langkat pada tanggal 11 Juni 2024.
- ac. High Level Meeting dan Focus Group Discussion Pengendalian Inflasi Antara Kabupaten Langkat, Karo dan Dairi dengan tema “Langkah Preventif dan Kuratif Pengendalian Inflasi serta penguatan Komitmen dan Sinergi”, bertempat di Hotel Sibayak Berastagi Kabupaten Karo pada tanggal 14-15 Juni 2024.
- ad. High Level Meeting Pemantapan Implementasi Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertempat di Tamarin Hotel Jakarta pada tanggal 21-22 Juni 2024.
- ae. Rapat koordinasi terkait pembahasan tindaklanjut rencana penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan pengendalian inflasi daerah bertempat di Ruang Rapat Press Conference Kantor Bupati Langkat pada tanggal 26 Juni 2024.
- af. High Level Meeting terkait Penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran - Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juni 2024.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan terkait upaya pengendalian inflasi di

daerah, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Langkat mengevaluasi beberapa kebijakan, diantaranya :

1. Pemantauan stok dan kualitas pangan agar dilakukan secara intensif oleh TPID bersama Satgas Pangan termasuk melaksanakan sidak ke beberapa pasar tradisional bersama dengan Forkopimda di Kabupaten Langkat.
 2. Meningkatkan kembali kegiatan Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan secara berkelanjutan sebagai antisipasi kenaikan harga barang pokok penting sehingga stabilitas inflasi daerah dapat terjaga.
 3. Mendorong implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada dan memperluas kerja sama dengan daerah baru lainnya.
 4. Menggiatkan Bussiness Matching antara produsen dan distributor bersama dengan pihak ketiga seperti BUMD, koperasi, kelompok tani, nelayan dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan, perluasan jaringan pemasaran dan akuntabilitas penyaluran bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi pangan.
 5. Melakukan upaya pengawasan oleh tim pengendalian inflasi daerah (TPID) untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi.
 6. Meningkatkan efisiensi produksi pangan melalui sistem budidaya guna menjaga ketersediaan bahan pangan, pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam jual/beli barang, dan pembangunan sarana infrastruktur yang baik untuk kelancaran distribusi pangan.
 7. Membangun sinergi yang baik dalam bekerjasama antara Dinas/Instansi terkait yang tergabung dalam TPID dengan menjaga kualitas data dalam menyajikan informasi atau penyampaian laporan yang valid terkait harga kebutuhan pokok penting dan ketersediaan barang.
 8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Langkat pada saat terjadinya kebutuhan yang mendesak dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 9. Menciptakan inovasi kebijakan dengan mensinkronisasikan program kerja pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pengendalian inflasi dalam menjaga daya beli masyarakat demi stabilitas keterjangkauan harga.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi maka Pemerintah Kabupaten Langkat merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut :

- a. Melakukan operasi pasar murah bersama distributor dan pihak lainnya untuk komoditas bahan pokok penting terutama Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng dan Beras disertai dengan upaya menambah pasokan dari daerah lain yang memiliki tingkat harga yang lebih rendah.
- b. Memperkuat pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di tingkat pedagang dan distributor dengan melakukan koordinasi dengan distributor untuk memperoleh informasi kondisi pasokan terkini dan harga ke depan sebagai upaya antisipasi

pengendalian inflasi.

- c. Terus memperkuat koordinasi antar OPD dan instansi terkait untuk melakukan intervensi terhadap komoditas penyumbang utama inflasi dalam perubahan/kenaikan IPH sebagai upaya dalam menstabilkan harga komoditi tersebut.
- d. Meningkatkan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap SPBU wilayah Kabupaten Langkat untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM.
- e. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar Daerah ataupun Provinsi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan membangun sarana infrastruktur yang baik sehingga dapat mendorong kelancaran distribusi/penjualan barang.
- f. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Adha perimntaan hewan ternak sapi dan kambing semakin meningkat oleh karenanya perlu untuk mempersiapkan langkah antisipasi dampak penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap pasokan ternak sapi dari luar Kabupaten Langkat.
- g. Melaksanakan gerakan menanam dengan menanam komoditas hortikultura seperti cabai di pekarangan rumah, sekolah maupun pondok pesantren untuk menjaga ketersediaan komoditas dan ketahanan
- h. Melakukan sidak pasar, monitoring dan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok penting secara intensif bersama Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Kabupaten Langkat.
- i. Penyediaan Informasi Harga dan ketersediaan/stok komoditas secara *real time*.
- j. Kampanye belanja bijak, no panic buying, serta belanja online.
- k. Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten/Kota lainnya penghasil komoditas